



MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 4 TAHUN 1992

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI BANDAR UDARA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk menetapkan klasifikasi bandar udara sesuai dengan keberadaannya, diperlukan penyempurnaan terhadap kriteria klasifikasi bandar Udara, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 117/AU.104/Phb-82 tanggal 3 April 1982;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91 / OT.002/Phb-80 dan Nomor KM.164/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Departemen Perhubungan tahun 1990 dan tahun 1991.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 117/AU.104/Phb-82 tentang Kriteria Klasifikasi Pelabuhan Udara.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI BANDAR UDARA.

Pasal 1

Kriteria klasifikasi bandar udara adalah penentuan angka kredit bagi komponen-komponen yang berpengaruh terhadap pengelolaan bandar udara.

Pasal 2

Kriteria klasifikasi bandar udara sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini berlaku bagi seluruh bandar udara.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

- a. komponen jasa angkutan udara yang merupakan kemampuan pemberian pelayanan suatu bandar udara untuk pergerakan pesawat udara, penumpang, dan kargo, baik yang datang, transit maupun berangkat, terdiri dari unsur jumlah pergerakan pesawat udara, penumpang dan kargo;
- b. komponen pelayanan keselamatan penerbangan yang merupakan kemampuan suatu bandar udara untuk memberikan pelayanan operasi dan keselamatan penerbangan sesuai dengan tingkatan pelayanan operasi penerbangan terdiri dari unsur keselamatan lalu lintas udara, operasi darat, penerangan aeronautika dan jasa operasi bandar udara;
- c. komponen daya tampung bandar udara yang merupakan kemampuan landasan pacu dan tempat parkir suatu bandar udara untuk menampung pemberangkatan, pendaratan dan pemarkiran pesawat udara, terdiri dari unsur daya tampung landasan dan parkir pesawat udara;
- d. komponen fasilitas keselamatan penerbangan yang merupakan fasilitas elektronika dan listrik di bandar udara untuk menunjang operasi keselamatan penerbangan terdiri dari unsur fasilitas telekomunikasi penerbangan, navigasi udara, elektronika bandar udara dan listrik;
- e. komponen status dan fungsi bandar udara yang merupakan komponen yang mempengaruhi secara timbal balik pengembangan bandar udara dan lingkungannya, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun pertahanan keamanan nasional yang terdiri dari unsur status bandar udara, penunjang pembangunan daerah, moda transportasi dan pertahanan keamanan.

Pasal 4

- (1) Angka kredit yang diberikan terhadap seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditentukan 100 dengan pembagian sebagai berikut:

- a. komponen jasa angkutan udara maksimum 55 angka kredit;
 - b. komponen pelayanan keselamatan dan keamanan penerbangan maksimum 15 angka kredit;
 - c. komponen daya tampung bandar udara maksimum 10 angka kredit;
 - d. komponen fasilitas keselamatan penumpang maksimum 10 angka kredit;
 - e. komponen status dan fungsi bandar udara maksimum 10 angka kredit.
- (2) Rincian angka kredit untuk tiap unsur masing-masing komponen kriteria klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Penetapan klasifikasi bandar udara didasarkan pada jumlah angka kredit yang diperoleh bandar udara yang bersangkutan.

Pasal 6

Berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, bandar udara diklasifikasikan dalam kelas sebagai berikut:

- a. Bandar Udara Kelas Utama;
- b. Bandar Udara Kelas IA;
- c. Bandar Udara Kelas I B;
- d. Bandar Udara Kelas II A;
- e. Bandar Udara Kelas II B;
- f. Bandar Udara Kelas III A;
- g. Bandar Udara Kelas III B;
- h. Bandar Udara Kelas IV;
- i. Bandar Udara Kelas V.

Pasal 7

- (1) Jumlah angka kredit untuk menetapkan klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bandar Udara Kelas Utama, jumlah angka kredit lebih dari 97.00 s/d 100.00;
- b. Bandar Udara Kelas I A, jumlah angka kredit lebih dari 85.00 s/d 97.00;
- c. Bandar Udara Kelas I B, jumlah angka kredit lebih dari 70.00 s/d 85.00;
- d. Bandar Udara Kelas II A, jumlah angka kredit lebih dari 55.00 s/d 70.00;
- e. Bandar Udara Kelas II B, jumlah angka kredit lebih dari 40.00 s/d 55.00;
- f. Bandar Udara Kelas III A, jumlah angka kredit lebih dari 32.50 s/d 40.00;
- g. Bandar Udara Kelas III B, jumlah angka kredit lebih dari 25.00 s/d 32.50;
- h. Bandar Udara Kelas IV, jumlah angka kredit lebih dari 20.00 s/d 25.00;
- i. Bandar Udara Kelas V, jumlah angka kredit 10.00 s/d 20.00.

- (2) Bagi suatu bandar udara yang jumlah angka kreditnya kurang dari 10.00 diklasifikasikan sebagai bandar udara non kelas.

Pasal 8

Perubahan terhadap kriteria klasifikasi bandar udara sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan atas usul Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 9

Berdasarkan perhitungan nilai sesuai kriteria klasifikasi bandar udara sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, untuk kelas bandar udara di lingkungan Departemen Perhubungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Peninjauan dan penilaian kembali terhadap kelas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun.
- (2) Usulan penetapan kelas bandar udara dan atau perubahan atas hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan.

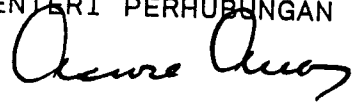
Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 Pebruari 1992

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Para Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan KAPOLRI.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan dan Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan.
5. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan.
6. Sekditjen dan para Kepala Direktorat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.
7. Para Kakanwil Dephub di seluruh Indonesia.
8. Administrator Bandar Udara Soekarno-Hatta.
9. Para Kepala Bandar Udara.
10. Direktur Utama PAP I dan PAP II.

kriteria/188

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 4 TAHUN 1992

TANGGAL : 11 Februari 1992

ANGKA KREDIT KOMPONEN KRITERIA
KLASIFIKASI BANDAR UDARA

1. Komponen Jasa Angkutan Udara

a. Jumlah Penumpang pertahun (berangkat-datang dan transit)

Jumlah Penumpang pertahun		Angka kredit
8.000.001	ke atas	30
4.000.001	s/d 8.000.000	29
2.000.001	s/d 4.000.000	28
1.000.001	s/d 2.000.000	27
600.001	s/d 1.000.000	26
400.001	s/d 600.000	25
350.001	s/d 400.000	23
250.001	s/d 350.000	21
200.001	s/d 250.000	19
175.001	s/d 200.000	17
150.001	s/d 175.000	15
125.001	s/d 150.000	13
100.001	s/d 125.000	11
75.001	s/d 100.000	9
50.001	s/d 75.000	6
1	s/d 50.000	3

b. Jumlah Kargo dalam ton pertahun (berangkat dan datang)

Jumlah Kargo dalam ton pertahun		Angka kredit
50.001	ke atas	15
25.001	s/d 50.000	14.50
15.001	s/d 25.000	14
10.001	s/d 15.000	13.50
7.001	s/d 10.000	13
4.001	s/d 7.000	12.50
2.501	s/d 4.000	12
1.501	s/d 2.500	11.50
1.001	s/d 1.500	11
701	s/d 1.000	10
451	s/d 700	8.50
301	s/d 450	7
201	s/d 300	5
151	s/d 200	4
100	s/d 150	2.50
1	s/d 100	1

c. Jumlah Pergerakan Pesawat per tahun (berangkat-datang dan transit).

Jumlah Pergerakan Pesawat pertahun			Angka kredit
100.001	ke atas		10
60.001	s/d	100.000	9.75
35.001	s/d	60.000	9.50
20.001	s/d	35.000	9.25
14.001	s/d	20.000	9
10.001	s/d	14.000	8.50
6.001	s/d	10.000	7.50
3.001	s/d	6.000	7
2.001	s/d	3.500	6.50
1.250	s/d	2.000	6
751	s/d	1.250	5
401	s/d	750	4
251	s/d	400	3
151	s/d	200	2
101	s/d	150	1
1	s/d	100	1

2. Komponen Pelayanan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan :

a. Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Udara.

Jenis Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Udara	Angka kredit
1) ACC (Areal Control Centre)	= 2,25
2) APP (Aproach Control Office)	= 1,25
3) ADC/AFIS (Aerodrome Control /Adrome flight information services)	= 1,00
4) MWARA (Mayor World Air Route Area)	= 0,75
5) RDARA (Regional Domestic Air Route Area)	= 0,50
6) AFS (Aeronautical Fixed Station)	= 0,25

b. Pelayanan Operasi Darat :

1) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PK-PPK)

Jenis PK-PPK	Angka kredit
a) Tingkat I	= 2,25
b) Tingkat II	= 2,00
c) Tingkat III	= 1,50
d) Tingkat IV	= 1,00

2) Pengamanan Dalam :

Jenis Pengamanan Dalam	Angka kredit
a) Tingkat I Skrining penumpang, bagasi, kargo, dengan alat	= 1,75
b) Tingkat II Skrining penumpang, bagasi, dengan alat	= 1,50
c) Tingkat III Skrining penumpang dengan alat	= 1,00
d) Tingkat IV Skrining penumpang secara manual	= 0,75

3) Operasi Terminal

Jenis Operasi Terminal	Angka Kredit
a) Tingkat I -Pelayanan Operasi Terminal -Pelayanan Umum -Pelayan konsesioneer -Pelayanan perkantoran	= 1,50
b) Tingkat II -Pelayanan Operasi Terminal -Pelayanan Umum -Pelayanan konsesioneer	= 1,25
c) Tingkat III -Pelayanan Operasi Terminal -Pelayanan Umum	= 1,00
d) Tingkat IV -Pelayanan Operasi Terminal	= 0,50

4) Fasilitas Pengisian
Bahan Bakar = 0,50

c. Pelayanan Penerangan Aeronautika :

Jenis Pelayanan Penerangan Aeronautika	Angka Kredit
AIS (Aeronautical In- formation Service) Kelas I	= 1,50
AIS (Aeronautical In- formation Service) Kelas II	= 1

d. Waktu Operasi Bandar Udara :

Waktu Operasi Bandar Udara	Angka Kredit
I (24 Jam)	= 1,50
II (Pukul 06.00 s/d 23.00)	= 1
III (Pukul 06.00 s/d 18.00)	= 0,75
IV (Pukul 06.00 s/d 11.00)	= 0,50

3. Komponen Daya Tampung Bandar Udara :

a. Daya Tampung Landasan Pacu:

Kemampuan Daya Tampung Landasan Pacu	Angka kredit
B-747, DC-10, MD-11 dan sejenisnya	= 6,00
A-300, B-757, B-767 dan sejenisnya	= 5,50
DC-9, F-100, B-737 dan sejenisnya	= 5,00
F-28, C-130 dan sejenisnya	= 4,00
F-27, HS-748, DASH-7, CN-235, N-250 dan sejenisnya	= 3,00
C-212, Twin Otter, DC-3 dan sejenisnya	= 2,00
BN-2A ke bawah	= 1,00

b. Daya Tampung Pelataran Parkir Pesawat Udara (m²)

Luas Pelataran Parkir Pesawat	Angka kredit
125.000 - lebih	= 4,00
65.000 - 125.000	= 3,50
25.000 - 65.000	= 3,00
20.000 - 25.000	= 2,50
15.000 - 20.000	= 2,00
7.001 - 15.000	= 1,50
2.001 - 7.000	= 1,00
1.000 - 2.000	= 0,50
Di bawah 1.000	= 0,25

4. Komponen Fasilitas Keselamatan Penerbangan

a. Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan

Peralatan Penunjang untuk :

Jenis Peralatan Fasilitas Keselamatan Penerbangan

	Angka kredit.
1) ACC (Aerodrome Control Center)	= 1,00
2) APP (Approach Control Office)	= 0,30
3) MWARA (Major World Air Route Area)	= 0,30
4) MSC/AMSC (Message Switching Center/ Automatic Message Switching Center)	= 0,30
5) ADC/AFIS (Aerodrome Control Tower/ Aerodrome Flight Information Services)	= 0,20
6) PTP/HF-SSB (Point to Point/Single Side Band)	= 0,20
7) RDARA (Regional/Domestic Air Route Area)	= 0,20

b. Fasilitas Navigasi Udara

Jenis Peralatan Fasilitas Navigasi Udara

	Angka Kredit
1) ILS/MLS (Instrument Landing System/ Microwave Landing System)	= 1,00
2) RADAR (Radio Detection And Ranging)	= 1,00
3) DVOR/DME (Doppler Very high frequensi Omni Range/Distance Measuring Equipment)	= 0,70
4) NDB (Non Directional Beacon)	= 0,30

c. Fasilitas Elektronika Bandara

Jenis Fasilitas Elektronika Bandara

	Angka Kredit
1) Konsol dan pemapar (Display) ATC & Komunikasi	= 0,50
2) CIS (Sistem informasi terpusat)	= 0,40
3) RDPS (Sistem pengolahan data Radar)	= 0,40
4) FDPS (Sistem pengolahan data flight plan)	= 0,30
5) Sistem securiti pengamanan bandar udara terpusat	= 0,25
6) Peralatan securiti pemeriksaan penumpang dan barang	= 0,15

d. Fasilitas Listrik

Jenis Fasilitas Listrik	Angka Kredit
a) Catu Daya PLN	= 0,60
b) Catu Daya Cadangan	= 0,60
c) Alat Bantu Pendaratan Visual	= 0,60
d) Transmisi & Distribusi	= 0,30
e) Peralatan Elektromekanikal statis	= 0,20
d) Peralatan Elektromekanikal Dinamis	= 0,20

5. Komponen Status dan Fungsi :

a. Status Bandar Udara

Jenis Status Bandar Udara	Angka Kredit
1) Pintu Masuk/Pelayanan Internasional	= 3
2) Ibu Kota Propinsi	= 2,5
3) Perbatasan	= 1,5

b. Penunjang Pembangunan Daerah

Jenis Penunjang Pembangunan Daerah	Angka kredit
1) Pusat Wilayah Pengembangan Utama	= 3
2) HUB (Pusat penyebaran)	= 2
3) SPOK (Cabang Penyebaran)	= 1.50

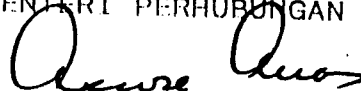
c. Aksesibilitas Daerah (Moda transportasi)

	Angka kredit
1) Tinggi (3 Moda)	= 1
2) Sedang (2 Moda)	= 1.5
3) Rendah (1 Moda)	= 2

d. Pertahanan Keamanan

	Angka kredit
1) Bandara Sipil - Militer	= 2
2) Sipil	= 1

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 4 TAHUN 1992

TANGGAL : 11 FEBRUARI 1992

NAMA DAN KELAS BANDAR UDARA

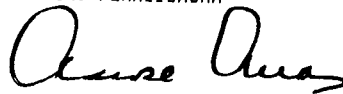
NO :	NAMA BANDAR UDARA	KELAS	SATUAN KERJA BANDAR UDARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SOEKARNO HATTA/ JAKARTA	Utama		
2	NGURAH RAI/ BALI	I A		
3	HASANUDDIN/ UJUNG PANDANG	I A		
4	POLONIA/ MEDAN	I A		
5	JUANDA/ SURABAYA	I A		
6	HALIM PERDANAKUSUMA/ JAKARTA	I B		
7	S.M.BADARUDDIN II/ PALEMBANG	I B		
8	SYAMSUDDIN NOOR/ BANJARNASIN	I B		
9	SUPADIO/ PONTIANAK	I B		
10	SEPINGGAN/ BALIKPAPAN	I B		
11	FRANS KAISIEPO/ BIAK	I B		
12	ACHMAD YANI/ SEMARANG	I B		
13	ADI SUTJIPTO/ JOGJAKARTA	I B		
14	SAM RATULANGI/ MENADO	I B		
15	SIMPANG TIGA/ PEKANBARU	I B	Pasir Pangaraian (Riau)	
16	TABING/ PADANG	II A		
17	SENTANI/ JAYAPURA	II A	Ubrub,Dabra,Senggo,Waris,Lereh. (Irian Jaya)	
18	HANS NADIM/ BATAM	II A		
19	PATIMURA/ AMBOH	II A		
20	HUSEIN SASTRANEGARA/ BANDUNG	II A	Olilit,Saulaki (Maluku)	
21	ELTARI / KUPANG	II A		
22	ADI SUMARMO/ SOLO	II A	Lewoleba/P.Lembata (NTT)	
23	SELOPARANG/ AMPENAN	II A		
24	MUTIARA/ PALU	II A		
25	PANGKAL PINANG/ BANGKA	II A		
26	CILIX RIWUT/ PALANGKARAYA	II B		
27	SULTAN TAHA/ JAMBI	II B		
28	BLANG BINTANG/ BANDA ACEH	II B		
29	BULUH TUMBANG/ TANJUNG PANDAN	II B		
30	Juwata/ TARAKAN	II B		

NO	NAMA BANDARA	KELAS	SATAUAN BANDAR	KERJA UDARA	KETERANGAN
31	WOLTER MONGINSIDI/ KENDARI	II B			
32	WAMENA/ JAYAWIJAYA	II B	Kiwirok, Karubala, Batom, Tion, Kelila		(Irian Jaya)
33	PADANG KEMILING/ BENGKULU	II B			
34	MOPAH/ MERAUKE	II B	Ewer, Muting, Bade, Kiman, Bomakia,		Manggalum, Sengge (Irian Jaya)
35	BRANTI/ TANJUNG KARANG	II B			
36	KIJANG/ TANJUNG PINANG	II B			
37	JEPMAN/ SORONG	II B	Awasi, Sorong Daratan		(Irian Jaya)
38	ISKANDAR/ PANGKALAN BUM	III A			
39	NABIRE/ PANTAI	III A	Illega, Illu, Obano, Bilai, Kebo.		(Irian Jaya)
40	KOMORD/ DILLI	III A	Decusi, Maliana		(Tim-Tim)
41	TEMINDUNG/ SAMARINDA	III A			
42	M. ASAN/ SAMPIT	III A	Kuala Pembuang		(Kalteng)
43	BABULLAH/ TERNATE	III A	Emalamo/Sanana		(Maluku)
44	WAI OTI/ MAUMERE	III A			
45	JALALUDDIN/ GORONTALO	III A			
46	STAGEN/ KOTABARU	III B			
47	EMARDALI	III B			
48	RENDANI/ MANDOKWARI	III B	Kebar, Rensiki, Babo, Anggi.		(Irian Jaya)
49	BUDIARTO/ CURUG	III B			
50	MAU HAU/ WAINGAPU	III B			
51	DABO/ SINGKEP	III B			
52	M. SALAHUDDIN/ BINA	III B			
53	JAPURA/ RENGAT	III B			
54	UTAROM/ KAIMANA	III B			
55	SATAR TACIK/ RUTENG	III B			
56	RAHADI USMAN/ KETAPANG	III B			
57	SUSILO/ SINTANG	III B			
58	WAGHETE	III B			
59	OKSIBIL	III B			
60	BURUNG/ LUWUK	III B			

NO	NAMA BANDARA	KELAS	SATAUAN BANDAR	KERJA UDARA	KETERANGAN
61	BRANG BIJI/ SUMBAWA BESAR	III B			
62	MUTIARA II/LABUAN BAJU	IV			
63	KALIMARAU/ BERAU	IV			
64	DUMATUBUN/ LANGGUR	IV			
65	MALIKUL SALEH/ LHOX SEUMAME	IV			
66	H.HASAN ARDEBOESMAN/ ENDE	IV			
67	PANGSUMA/ PUTUSIBAU	IV			
68	BINAKA/ G.SITOLI	IV			
69	LASIKIN/ SINABANG	IV			
70	NAHA/TAHUNA	IV			
71	TUNGUL WULUNG/ CILACAP	IV			
72	BERINGIN/ MUARA TEME	IV			
73	TOREA/ FAK-FAK	IV			
74	LALOS/ TOLI-TOLI	IV			Akimuga (Irian Jaya) Ponggul/Boul (Sulteng)
75	MULIA	IV			
76	CUT NYAK DHIEN/ MEULABOH	IV			
77	SERUI	IV			
78	KASIGUNCU/ POSO	IV			
79	GAMARMALAM/ GALELA	IV			
80	PONS TIKU/ TANA TORAJA	IV			
81	MALI/ ALOR	IV			
82	TAMBOLAKA/ WAIKABUBAK	IV			
83	AMAHAI/ P.SERAM	IV			
84	SEI BATI/ TANJUNG BALAI KARIMUN	IV			
85	DESMAN SADIK/ LABUHA	IV			
86	SANGGU/ BUNTOK	IV			
87	SARMI	IV			
88	MOANAMANI	IV			
89	NAMLEA/P.BURU	IV			
90	BANDANAIRA/ P.BANDA	IV			

NO	NAMA BANDARA	KELAS	SATUAN KERJA BANDAR UDARA	KETERANGAN
91	PENGGUNG/CIREBON	IV		
92	MINDIPTANAH	IV		
93	TANAH MERAH	IV		
94	SOA/BAJAWA	IV		
95	NANGAPINH	IV		
96	MELANGUANE/SANGIR TALAUD	IV		
97	KUABANG/KAD	IV		
98	BINTUNI	IV		
99	BETO AMBARI/BUTON	IV		
100	BEWANTANA/LARANTUKA	IV		
101	HALIMEN/ATAMBUA	IV		
102	TEMINABUAN	IV		
103	PINANG SORI/SIBOLGA	IV		
104	LEKUNIK/ROTE	V		
105	TARDAMU/SABU	V		
106	KOKONAO	V		
107	ROKOT/SIPORA	V		
108	RASIAN/TAPAK TUAN	V		
109	MUKO-MUKO	V		
110	INANWATAN	V		
111	SUGIMANURU/MUNA	V		
112	KEPI	V		
113	WASIOR	V		
114	NUMFOR	V		
115	SIBISA/PRAPAT	V		
116	TANJUNG HARAPAN/TJ.SELOR	V		
117	BOKONDINI	V		
118	TAMPA PADANG/HAMUJU	V		
119	DATA DAWAI	V		
120	OKABA	V		
121	LONG BAWAN	V		
122	ANDI JEMMA/MASAMBA	V		
123	LUNYUK/SUNBAWA	V		
124	TRUNOJOYO/SUHENEP	V		
125	DEPATI PARBO/KERINCI	V		
126	IJAHABRA	V		
127	AEK GODANG	V		
128	LONG APUNG	V		

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZHAR ANAS

NO	NAMA BANDARA	KELAS	SATUAN KERJA BANDAR UDARA	KETERANGAN
91	PENGGUNG/CIRERON	IV		
92	MINDIPTANAH	IV		
93	TANAH MERAH	IV		
94	SOA/BAJAWA	IV		
95	NANGAPINOH	IV		
96	MELANGUANE/SANGIR TALAUD	IV		
97	KUABANG/KAO	IV		
98	BINTUNI	IV		
99	BETO AMBARI/BUTON	IV		
100	GEWAYANTANA/LARANTUKA	IV		
101	HALIMEN/ATAMBUA	IV		
102	TEMINABUAN	IV		
103	PINANG SORI/SIBOLGA	IV		
104	LEKUNIK/ROTE	V		
105	TARDAMU/SABU	V		
106	KOKONAO	V		
107	ROKOT/SIPORA	V		
108	RASIAN/TAPAK TUAN	V		
109	MUKO-MUKO	V		
110	INANWATAN	V		
111	SUGIMANURU/MUNA	V		
112	KEPI	V		
113	WASIOR	V		
114	NUMFOR	V		
115	SIBISA/PRAPAT	V		
116	TANJUNG HARAPAN/TJ. SELOR	V		
117	ROKONDINI	V		
118	TAMPA PADANG/MANUJU	V		
119	DATA DAWAI	V		
120	OKABA	V		
121	LONG BAHAN	V		
122	ANDI JENMA/MASAMBA	V		
123	LUNYUK/SUMBAWA	V		
124	TRUNOJOYO/SUMENEP	V		
125	DEPATI PARBO/KERINCI	V		
126	IJAHABRA	V		
127	AEK GODANG	V		
128	LONG APUNG	V		

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

NO	NAMA BANDARA	KELAS	SATUAN KERJA BANDAR UDARA	KETERANGAN
91	PENGGUNG/CIREBON	IV		
92	MINDIPTANAH	IV		
93	TANAH MERAH	IV		
94	SOA/BAJAWA	IV		
95	NANGAPINDH	IV		
96	MELANGUANE/SANGIR TALAUD	IV		
97	KUABANG/KAO	IV		
98	BINTUNI	IV		
99	BETO AMBARI/BUTON	IV		
100	GEWAYANTANA/LARANTUKA	IV		
101	HALIWEN/ATAMBUA	IV		
102	TEMINABUAN	IV		
103	PINANG SORI/SIBOLGA	IV		
104	LEKUNIK/ROTE	V		
105	TARDAMU/SABU	V		
106	KOKONAO	V		
107	ROKOT/SIPORA	V		
108	RASIAN/TAPAK TUAN	V		
109	MUKO-MUKO	V		
110	INANWATAN	V		
111	SUGIMANURU/MUNA	V		
112	KEPI	V		
113	WASIOR	V		
114	NUMFOR	V		
115	SIBISA/PRAPAT	V		
116	TANJUNG HARAPAN/TJ.SELOR	V		
117	BOKONDINI	V		
118	TAMPA PADANG/MAMUJU	V		
119	DATA DANAI	V		
120	OKABA	V		
121	LONG BAHAN	V		
122	ANDI JEMMA/MASAMBA	V		
123	LUNYUK/SUMBAWA	V		
124	TRUNOJOYO/SUMENEP	V		
125	DEPATI PARBO/KERINCI	V		
126	IJAHABRA	V		
127	AEK GODANG	V		
128	LONG APUNG	V		

MENTERI PERHUBUNGAN

Azwar Anas

Ir. AZWAR ANAS

NO	NAMA BANDARA	KELAS	SATUAN KERJA BANDAR UDARA	KETERANGAN
91	PENGSUNG/CIREBON	IV		
92	MINDIPTANAH	IV		
93	TANAH MERAH	IV		
94	SOA/BAJAWA	IV		
95	HANGAPINOH	IV		
96	MELANGUANE/SANGIR TALAUD	IV		
97	KUABANG/KAO	IV		
98	BINTUNI	IV		
99	BETO AMBARI/BUTON	IV		
100	GEMAYANTANA/LARANTUKA	IV		
101	HALIWEN/ATAMBUA	IV		
102	TEMINABUAN	IV		
103	PINANG SORI/SIBOLGA	IV		
104	LEKUNIK/ROTE	V		
105	TARDAMU/SABU	V		
106	KOKONAO	V		
107	ROKOT/SIPORA	V		
108	RASIAN/TAPAK TUAN	V		
109	MUKO-MUKO	V		
110	INANWATAN	V		
111	SUGIMANURU/MUNA	V		
112	KEPI	V		
113	WASTOR	V		
114	NUMFOR	V		
115	SIBISA/PRAPAT	V		
116	TANJUNG HARAPAN/TJ.SELOR	V		
117	BOKONDINI	V		
118	TAMPA PADANG/MAMUJU	V		
119	DATA DAWAI	V		
120	OKABA	V		
121	LONG BAWAN	V		
122	ANDI JEMMA/MASAMBA	V		
123	LUNYUK/SUMBANA	V		
124	TRUNOJOYO/SUMENEP	V		
125	DEPATI PARBO/KERINCI	V		
126	IJAHABRA	V		
127	AEK GODANG	V		
128	LONG APUNG	V		

MENTERI PERHUBUNGAN *TR 3/1* *Ukhar*
Azwar Anas
 K.D

Ir. AZWAR ANAS